

KAMIS, 14 JULI 2016/9 SYAWAL 1437 H

# PRO KONTRA ALIH TANGAN PENGELOLAAN SMA/SMK

Oleh:

Nasrini Akbar

Exco AN Antas, mahasiswa Program Doktor Manajemen Pendidikan UM Malang

**L**ATAR belakang lahirnya sebuah kebijakan di Indonesia selalu diwarnai bumbu-bumbu kepentingan. Baik kepentingan pribadi, keluarga, golongan, dan negara. Selalu menjadi problem bangsa adalah kebijakan yang berbaju kepentingan negara tetapi sebenarnya hanya untuk kepentingan pribadi atau golongan. Dan hal itu sangat sulit dilihat secara kasat mata bagaikan batu hitam dalam kegelapan malam.

Sejak pertengahan tahun 2015 seluruh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan pekerjaan ekstra yaitu mendata sinkronisasi SK para guru di setiap disdik. Apalagi guru yang pernah mutasi di minta untuk menyerahkan fotocopy SK untuk memastikan tempat ngajar sesuai SK mutasi yang mutasi bukan sekedar nota dinas.

Jika hanya nota dinas maka akan dipastikan dengan SK dari Bupati. Para guru menyebutnya untuk memindahkan status pegawai dari pegawai Kabupaten menjadi Pegawai Provinsi dan ternyata manajemen pengelolaan SMA mulai tahun 2016 ini dilakukan oleh Dinas Diknas Provinsi sebagai mana amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pro kontra terhadap kebijakan tersebut menjadi politik bahkan sampai kepada gugatan ke Mahkamah Konstitusi berupa uji materi UU No. 23 tahun 2014 oleh Pemerintah Kabupaten Blitar dan Pemkot Surabaya bahkan Walikota Surabaya Tri Rismaharani menentang keras kebijakan tersebut sebab khawatir sekolah-sekolah tidak gratis bila SMA/SMK dialihkan pengelolaannya ke Provinsi. Sementara menunggu putusan MK, Meteri Pendidikan Nasional Anies Baswedan menegaskan untuk terus melaksanakan sesuai perintah Undang-undang. Kata beliau "ketika tahun 2001 semuanya diserahkan ke daerah, apa kemendikbud protes? Tidak ini Uang Negara, bukan milik pribadi" (n.metrotvnews.com/jatim/p).

Heru Budi Setyawan Pemhati Pendidikan menilai positif alih tangan pengelolaan SMA/SMK dilakukan oleh Pemerintah Provinsi pertama pengelolaan lebih fokus sesuai jangkauannya perguruan tinggi Dikti, Dikmen Provinsi, Dikdas Kabupaten/Kota, lebih efisien, mudah mendeteksi keberhasilan dan kegagalan, lebih adil pengelolaan pendidikan. Kedua mengurangi praktek Kolusi, Korupsi dan nepotisme (KKN), ketiga terjadi pemerataan mutu pendid-

dikan, keempat menghemat anggaran Kabupaten dan Kota. Penilaian ini sebenarnya tidak mendalam dan terkesan subjektif.

Selama ini sebenarnya Indonesia tidak melakukan apa-apa pada dunia pendidikan, Indonesia hanya melakukan tradisi rutinitas sebagaimana dilakukan sebuah keluarga dalam mendidik anaknya. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian pada tahun 2015 OECD Melakukan survey terhadap 76 negara di Asia dengan melakukan tes PISA terhadap siswa yang berusia 15 tahun, Indonesia berada pada peringkat 69 dari 76 negara di Asia.

Muncul pertanyaan dikemanakan dan diapakan uang Negara yang sangat banyak yaitu minimal 20 % dari APBN dan APBD untuk alokasi dana operasional pendidikan di Indonesia. Kemanakah tokoh intelektual/para ahli pendidikan kita, kemanakah pendidik dan akademisi, sudahkah mereka diberdayakan?

Persoalan manajemen pendidikan dari jaman orde baru sampai orde reformasi ternyata masih berkulit pada kulit luarnya saja, ganti kulit tetapi banyak menguras tenaga, pikiran dan uang, seakan kebingungan untuk menguras habis dana pendidikan yang begitu besar. Sementara masyarakat dituntut untuk ikut menanggung biaya pendidikan, berupa pungutan-pungutan yang tidak jelas dari sekolah. Tidak masalah bagi masyarakat mampu, tetapi jadi masalah bagi yang kelihatan mampu tapi sebenarnya tidak mampu akan menjadi beban keluarga.

Problem bangsa kita ini sebenarnya terjebak kepada keseragaman bukan pada keberagaman sehingga Prof Sudena Degeng membuat slogan "Keseragaman No. .... Keberagaman Yes. ...." Ketika berskolah hampir semuanya ingin menjadi PNS, sebab lahan lain tidak menjanjikan. Manajemen pendidikan di Indonesia yang penuh dengan keberagaman ini tidak bisa dikelola dengan hanya berfokus pada sentralisasi manajemen yang dilakukan secara makro.

Dalam pengembangan manajemen selain mengacu kepada tujuan pendidikan nasional tetapi juga harus berbasis kearifan lokal dan potensi daerah dengan tidak mengesampingkan mutu. Kearifan lokal dan potensi daerah sebenarnya terletak di Kabupaten/Kota sehingga sangatlah tepat jika manajemen pendidikan dikdas dan dikmen dipegang oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi sebagai koordinator bagi pengelolaan pendidikan yang ada di provinsi bersangkutan.

Prof Sonhadji berpendapat bahwa antara pendidikan dasar dan menengah harus dikelola secara berkesinambungan demi efektifnya proses pendidikan, bahkan

Penyelenggaraan pendidikan harus sepenuhnya dipercayakan kepada pemerintah daerah yang memiliki wilayah yaitu pemerintah kabupaten/kota, merakalah yang sangat paham dengan daerahnya sehingga pengelolaan dengan berbasis kearifan lokal dan potensi daerah berjalan dengan baik. Pengelolaan pendidikan SMA/SMK yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi sementara sekolahnya terletak di kabupaten/kota sepertinya menipiskan memelihara anak ke pamannya.

Ditengah kemajuan jaman saat ini sebenarnya sangat riskan membahas masalah jatah mengelola pendidikan. Kita sudah ketinggalan seratus bahkan seribu tahun kalau yang dipersalkan hanya jatah kemudian jatah lagi pembagian kue yang ujung-ujungnya untuk mendapatkan keuntungan finansial. Assesment kebutuhan hanya dijadikan proyek yang tidak bisa dijadikan tolak ukur, penelitian hanya sekedar proyek agar dana terserap, kegiatan pendidikan hanya sebagai rutinitas formal belaka.

Bangsa Indonesia yang berjiwa gotong royong dan menilai jelek kapitalis, tetapi praktek kapitalis dalam dunia pendidikan di Indonesia terus berjalan. Sementara di negar-negara maju misalnya di Jerman dan Finlandia bagi siapa yang menempuh pendidikan kejuruan yang nantinya akan bekerja, seluruh biaya bahkan sampai biaya hidup ditanggung oleh negara dan pihak perusahaan swasta. Berbanding terbalik dengan di Indonesia pendidikan kejuruan apalagi kesehatan bayarannya selangit, sampai-sampai ada yang menjual sawahnya untuk membiayai anak kuliah. Padahal yang bersangkutan nantinya akan bekerja untuk masyarakat dan mengabdikan untuk bangsa Indonesia.

Sekarang pertanyaannya adakah kemauan dari pemerintah, aparaturnegara, legeslatif, dan masyarakat Indonesia untuk menjadi negara maju dengan sedikit mengorbankan kepentingan pribadi dan golongan, untuk kepentingan dan kemajuan negara melalui pengelolaan manajemen pendidikan makro dan mikro yang maksimal. Sebab anak-anak kita bangsa Indonesia ini memiliki potensi yang luar biasa untuk dikembangkan dengan pengelolaan pendidikan dengan niat yang tulus, manajemen yang tepat.

Cobalah sedikit berkaca dengan negara-negara maju seperti Amerika serikat ketika Pada era tahun 1957 kembali pada pentingnya akademik, yang didorong oleh keadaan perang dingin dan penerbangan Soviet Sputnik (1957). Amerika terkejut pada keunggulan teknologi Soviet yang menjadi tantangan dan ancaman bagi tujuan nasional. Para kritikus dan para ahli dengan cepat menverukan untuk kembali ke